

SKENARIO PEMBIAYAAN MIKRO BUMDes BERBASIS POTENSI ELIT DESA SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

Didi Zulyanto; Dedi Herdiansyah; Sri Syabanita Elida
Prodi Administrasi Negara – Jurusan Administrasi Bisnis
Politeknik Negeri Pontianak
Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bansir Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78124
Telepon +62 0561 736180 +62 0561 740143.

Abstrack: *Dalam upaya memberdayakan seluruh potensi elit/aktor desa, maka kami mengkaji desain Skenario Pembiayaan Mikro BUMDes Berbasis Potensi Elit Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. Hal ini terutama dikarenakan bahwa di Kabupaten Kubu Raya yang merupakan daerah pemekaran terbaru di Provinsi Kalimantan Barat dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat. namun eksistensi seluruh potensi yang ada seperti kelompok tani/ perikanan belum mendapat perlindungan hukum dari pemerintah. Melalui metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik PRA dan FGD kajian mendalam dilakukan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk merancang desain implementasi dengan model penguatan pembiayaan mikro melalui pelebagaan BUMDes yang berbasis masyarakat di desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. Namun jika sudah ada tetapi kedudukan hukumnya yang masih belum jelas, ini berarti tinggal menindaklanjuti kepastian hukumnya saja. Kerumitan dan resiko pengelolaan pembiayaan mikro pada BUMDes membutuhkan kematangan kelembagaan yang memadai. Kondisi ini menjadi warga lebih berhati-hati ladi. Posisi desa yang memadai yakni dengan berbagai potensi yang ada membuat masih belum dan sulit untuk menyepakati keberadaan BUMDes.*

Keywords: *Skenario, BUMDes, Kredit Mikro, Koperasi.*

LATAR BELAKANG

Kabupaten Kubu Raya yang merupakan daerah pemekaran terbaru di Provinsi Kalimantan Barat dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat. Dalam bidang transportasi sangat tidak perlu diragukan lagi dengan perkembangan bandara internasionalnya. Dalam bidang pertanian dan perkebunan semakin luas dan variatif bahkan melibatkan masyarakat banyak. Demikian juga dalam bidang manajemen pemerintahan yang sama-

kin bersih dengan efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

Khususnya di bidang pertanian/ perikanan perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa pertumbuhan kelompok pertanian/perikanan sangat maju. Baik kelompok budidaya pertanian/perikanan, kelompok pengolahan hasil perikanan dan kelompok-kelompok lain yang masih berkaitan dengan pertanian/perikanan yang cukup banyak. Hal semacam ini terjadi juga di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dengan beberapa desanya.

Kelompok pertanian/perikanan di kecamatan ini cukup banyak namun eksistensinya belum mendapat perlindungan hukum dari pemerintah. Kondisi ini membuat kenyamanan mereka cukup mengkhawatirkan.

Sering dijadikan pilot proyek daerah meskipun syarat kelembagaan dan keberlanjutan masih lemah, Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya memiliki organisasi Kelompok Perikanan/Pertanian sekitar 10 buah yang belum dilindungi oleh Badan hukum, Perdes (Peraturan Desa) dan Perda (Peraturan Daerah). Gabungan Kelompok Pertanian (GAPOKTAN) meskipun sebuah Koperasi Desa sudah ada, namun keberdayaannya masih belum bisa diharapkan. Justeru semakin hari kelihatannya semakin lemah dan lumpuh karena tanpa sentuhan pemerintah daerah, dan apalagi dari pemerintah pusat.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan ini menimbulkan gagasan dari kami untuk ikut serta urun-rembug memikirkan tentang bagaimana mengembangkan potensi yang ada ini sehingga bisa banyak membantu masyarakat Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Perlu upaya pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penganggaran oleh masyarakat perlu dibantu secara proporsional dan rasional oleh pemerintah: Dibutuhkan payung kelembagaan dan peran jejaring mewujudkan Perda, Perdes dan legalitas badan hukum sehingga GAPOKTAN bisa lebih kuat.

Kerumitan dan resiko pengelolaan pembiayaan mikro pada BUMDes membutuhkan kematangan kelembagaan yang memadai. Posisi desa yang memadai yakni dengan Alokasi Dana Desa dan program ini disebut strategis mengingat desa sudah memiliki sumber pembiayaan permanennya.. Kredit

mikro memberi kemudahan diakses warga dan dikembangkan ke berbagai sektor usaha.

Kemandirian warga, di sisi lain, secara bertahap bisa menjadi pengganggu bagi kalangan elit politik. Inovasi ekonomi kerap menjadi kontraproduktif dengan kepentingan mereka sehingga menyediakan berbagai hambatan politis maupun sosial. Disinilah peran politis desa dan kabupaten juga dibutuhkan untuk memodernisasi potensi-potensi resistensi dari elit desa tersebut. Posisi dan legitimasi elit desa dan kabupaten lebih tinggi dan memiliki daya penetrasi yang lebih baik. Kemudian, pelibatan elit ekonomi desa ini sebenarnya dapat diakomodir pula dalam desain inovasi dengan tata cara yang lebih formal dan adil tentunya bagi masyarakat umum. Oleh karena itu, kompromi bisa saja dilakukan asalkan ada niat baik dan ketegasan pada elit ini untuk berbagi kesempatan dan sumberdaya dengan masyarakat desa yang kurang mampu.

Semua agenda ini mengarah pada upaya Desa merintis kemandirian lokalnya. Kesempatan kemandirian ini telah terbuka, tidak hanya diukur dari kian kuatnya posisi desa dalam struktur pemerintahan nasional tetapi telah diperkuat pula dengan berbagai skema kebijakan pada tingkat local sendiri baik dari indikator provinsi maupun dari kabupaten. Perluasan otonomi dan kewenangan ini semakin menguat dengan disertainnya berbagai skema desentralisasi keuangan yang merupakan konsekwensi penyebaran fungsi pemerintahan. Hal ini akan membentuk inovatif yang efektif ketika aktor pemerintah desa terutama Kabuapten dan desa mampu mengorganisir segenap sumberdaya tersebut menuju program strategis dan lebih inovatif.

Pada saatnya pelaksanaan program ini akan meningkatkan kemam-

puan pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan. Kehendak untuk mengadopsi model inovatif BUMDes akan memperhatikan segenap factor kunci diatas. Upaya pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes sesuai Permendagri nomor 39 tahun 2010 yaitu usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan dan pengelolaannya dilakukan pemerintah desa dan masyarakat bisa terwujud.

DASAR TEORI

Kelompok masyarakat memegang peranan penting dalam ekonomi sebuah desa, sebab masyarakat lingkup desa yang mengetahui segala potensi yang dimiliki desa tersebut. Demikian menurut pendapat Afifatur Rohimah dalam judul Memperkuat Basis Ekonomi Desa melalui Pemberdayaan Kelompok Dimasyarakat, (2014)

Bertitik tolak dari kajian Sutikno, dkk (2012) menyatakan bahwa membutuhkan pelebagaan bermitra dengan pemerintah dan swasta melalui: (1) pelatihan, (2) adopsi inovasi, (3) pendampingan, serta (4) kemitraan desa dengan pemerintah Kabupaten.

Sedangkan menurut Soebianto-ro, dkk (2013) komprehensifnya suatu riset sangat perlu untuk memberikan solusi terbaik bagi pelebagaan BUMDes bermitra dengan pemerintah dan swasta agar tujuan awal dari dibentuknya BUMDes untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa, memajukan dan mengembangkan perekonomian desa, pengumpulan modal usaha

dari berbagai sumber, dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat bisa tercapai.

Teori Kelembagaan dan Jaringan

Dalam kebijakan publik konteks perkembangan teori ada kecenderungan untuk melihat kebijakan sebagai hasil dari interaksi para aktor, baik pasar, negara, atau pun masyarakat. Oleh karenanya, analisis kebijakan publik dilihat sebagai sesuatu yang dinamis di antara proses interaksi. Hal ini kemudian akan membentuk regulasi atau pola tertentu tertentu. Regulasi atau pola itu dalam konteks interaksi dapat kita sebut sebagai jaringan. Jaringan (*network*) ini dapat dibedakan dengan kelembagaan (*institution*). Tahap berikutnya lebih merupakan “hasil” dari interaksi dinamis kelompok aktor yang ada dalam jaringan. Pemaknaan ini merupakan konsekuensi dari konsep yang memahami kebijakan “...is a result of governing processes that are no longer fully controlled by the government, but subject to negotiations between a wide range of public, semi-public and private actors...” (Torfing, 2007)

Relasi antar pelaku pemerintahan yang awalnya lebih bersifat vertikal, hierarkis dan regulatif kemudian mendekat ke arah horizontal, kesetaraan, dan konsensus. Mekanisme regulasi tetap relevan, tetapi mengalami pemudaran. Oleh karenanya, pensinergian politik dan pengelolaan sumber daya memerlukan mekanisme baru melalui manajemen jaringan antar aktor yang efektif. Secara teoritik paradigma pengelolaan jaringan baik untuk fungsi publik maupun privat dapat dikaji dengan meminjam kerangka teoritik yang dikembangkan oleh K Klijn, dkk (dalam Pratikno, 2007).

Belajar dari kasus Afrika, menurut Pratikno, Bank Dunia memberi pemaknaan baru terhadap istilah jejaring dalam paradigma *governance* ini yang mulai dipopulerkan secara efektif sejak tahun 1989. Dalam laporannya berjudul “Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth”. Laporan ini menekankan bahwa legitimasi

politik dan konsensus merupakan prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan. Pemerintah, bisnis dan masyarakat harus bersinergi membangun konsensus, fasilitatif, dan melibatkan aktor non-negara. Dalam Tabel 1 ditampilkan Tabel Pola Relasi sebagai berikut:

Tabel 1: Tabel Pola Relasi

Dimensi	Perspektif Hierarkis Intra Organisasional	Perspektif Jaringan Interorganisasional
Obyek analisis	Relasi antara pemerintah dan yang diperintah	Jejaring antar berbagai aktor
Karakter relasi	Otoritatif	Saling ketergantungan
Karakter proses kebijakan	Implementasi kaku terhadap kebijakan yang telah diformulasikan	Proses interaksi antar aktor untuk bertukar informasi, tujuan dan sumber daya
Kriteria keberhasilan	Pencapaian tujuan formal kebijakan	Realisasi aksi kolektif
Penyebab kegagalan	Tujuan-tujuan yang ambigu;terlalu banyak aktor;kurang kontrol	Kurang insentif atau banyak penghalang untuk aksi kolektif
Rekomendasi bagi governance	Koordinasi dan sentralisasi	Menfasilitasi dan membangun insentif untuk berinteraksi

Sumber : adaptasi dari Klijn, E-H (1997) dan Klijn, EH dan Koppenjan (2000).

Pendekatan atau teori kelembagaan (institusionalisme) dari para ahli yang sering digunakan yakni mendefinisikan lembaga dalam beragam pengertian. Definisi tentang kelembagaan yang berbeda-beda sering sekali kita jumpai. Namun, paling tidak ada empat kelompok besar perspektif dalam pendekatan atau teori kelembagaan yang dapat kita kemukakkan.

Pertama; *Rational Choice Institutionalism* memahami lembaga sebagai “aturan main dalam sebuah masyarakat”. Kedua; *Historical Institutionalism* mendefinisikan lembaga sebagai “prosedur formal atau informal, kebiasaan sehari-hari, norma-norma dan konvensi”. Ketiga; dalam perspektif *Sociological Institutionalism*, lembaga adalah “konvensi budaya, norma-norma dan kerangka kognitif”. Sedangkan yang keempat; *Constructivist*

Institutionlism mendefinisikan lembaga sebagai “sistem-sistem yang tersusun dari gagasan-gagasan dan praktik-praktik” (Hay dalam Rhodes, 2006). Sekalipun terdapat perbedaan perspektif, pada umumnya unsur-unsur kelembagaan meliputi yaitu unsur Aktor/agen/organisasi, unsur Aturan Main, unsur Desain, dan unsur Struktur.

Penelitian lain yaitu Healey (1992) dengan tema kelembagaan mengambil lokasi di Tyneside Inggris. Fokus perhatiannya tentang keterlibatan lembaga dalam proses pembangunan, relasi kuasa antar lembaga dan aktivitas-aktivitas lembaga dalam proyek pembangunan. Bertitik tolak dari Healey, disimpulkan bahwa peran aktor dalam setiap kejadian sangat bervariasi baik dalam input maupun output pembangunan. Variasi peran ini berkaitan dengan relasi, strategi dan

kepentingan yang terjadi di antara mereka, peraturan yang berlaku, mode produksi, sumber daya dan ide, regulasi, dan ideologi. Kajian ini membuktikan bahwa kelembagaan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan pembangunan terutama masyarakat pedesaan.

Pembangunan Partisipatif, Kredit Mikro, dan Badan Usaha

UU. No. 32 tahun 2004 merupakan sumber hukum bagi pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengacu pada Pemerintahan Daerah. Pada pasal 213 ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa “*Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa*”. Secara terinci tentang BUMDes dalam PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan PP tersebut, BUMDes didirikan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa itu sendiri. Pendirian BUMDes di desa hanya dimungkinkan jika mengacu pada tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMdes menurut Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang menaunginya. Peran Pemerintah kabupaten/kota disini menjadi nilai strategis dalam pendirian BUMDes.

Peran masyarakat dan sektor swasta tidak hanya dalam pengelolaan, akan tetapi lebih mendasar dari itu apabila mengacu pada uraian tentang teori kelembagaan dan jaringan. Pendirian BUMDes dapat kita letakkan sebagai titik temu di jejaring interaksi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah desa memiliki peran yang hampir sama dengan pemerintah daerah, perbedaan utamanya adalah dia juga bertindak sebagai pengelolanya bersama dengan masyarakat. Peran yang dijalankan pemerintah daerah selain mengatur secara legal melalui

peraturan daerah juga memberikan bantuan dana, serta menjadi fasilitator dalam mendirikan dan evaluator kerja BUMDes.

Berdasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, maka mendirikan BUMDes menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun hal ini akan sulit dicapai jika dibuat dengan logika *top-down*. Logika dasar dari gagasan mendirikan BUMDes yakni konsep pembangunan partisipatif. Oleh karenanya perencanaan dan pendiriannya harus berlandaskan tekad kerja yang partisipatif, transparansi, kooperatif, emansipatif, akuntabel, dan keberlanjutan. Dengan mengacu pada prinsip ini, pelibatan masyarakat dilakukan sejak awal. Pemerintah daerah dan pemerintah desa lebih cenderung berperan sebagai fasilitator saja. Dengan demikian, dalam bahasa yang lebih tegas, BUMDes bukan merupakan paket kebijakan instruksional dari pemerintah pusat atau pun daerah kepada desa tetapi nyaris sepenuhnya merupakan gagasan masyarakat desa tersebut.

Penelitian ini memberikan pengertian bahwa pelembagaan BUMDes mengacu pada upaya pembentukan aturan main (regulasi), pendirian organisasi, pemantapan nilai dan budaya kerja serta rutinisasi aktivitas dari pihak-pihak yang terlibat. Mak-sudnya adalah aturan main yang legal formal dari Perda dan Perdes. Pencapaian kelembagaan BUMDes hanya dapat tercapai melalui pembentukan jaringan *governance* yang melibatkan semua aktor. Dengan logika rasional partisipatif, maka proses perajutan jejaring itu tentu akan membutuhkan waktu dan pentahapan. Pemerintah daerah dan desa harus benar-benar berperan sebagai fasilitator dan mampu meyakinkan masyarakat bahwa

aspirasi dan partisipasi mereka merupakan komponen inti dari BUMDes. Di sinilah baru dapat terwujud impian besar masyarakat desa sejahtera.

METODE PENELITIAN

Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA)

Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah Metode yang secara harfiah artinya pengkajian desa secara partisipatif. Syahyuti (2006 : 215) menyatakan bahwa riset dengan metode *Participatory Rural Appraisal*(PRA) merupakan salah satu contoh riset yang menghargai dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pemberdayaan bagi masyarakat.

Dalam Mikkelsen, (2011) Chambers mengatakan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) memungkinkan orang-orang desa memungkinkan dan menganalisis situasi mereka sendiri, dan secara optimal merencanakan dan melaksanakan tekad itu di desanya sendiri, sehingga PRA adalah penilai pedesaan yang sangat kondusif partisipatoris.

Dengan demikian PRA adalah istilah yang diberikan kepada pendekatan penelitian yang menggunakan metode partisipatif dengan menekankan kepada pengetahuan lokal dan kemampuan masyarakat untuk membuat menganalisis sendiri, penilaian sendiri, dan merencanakan sendiri apa yang mereka butuhkan. Meskipun pada awalnya pendekatan ini digunakan di pedesaan, namun terbukti juga sesuai pada berbagai kondisi, termasuk masyarakat perkotaan. PRA memfasilitasi proses saling berbagi informasi (*information sharing*), analisis dan aktifitas antar *stakeholders*. Intinya PRA adalah “...to enable development practitioners, government official, and local people to work

together to plan context appropriate programs” (Syahyuti, 2006)

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat yang menjadi strategis karena berbagai rintisan usaha kelompok tani yang mengakomodir kelompok produktif dan berbasis mata pencaharian andalan warga sendiri. Pemilihan lokasi tersebut, dengan pertimbangan hasil penelitian dilaksanakan oleh Chamid Sutikno dkk (2011) untuk percontohan di desa ini tentang Masyarakat Desa yang belum mendapatkan perhatian berkelanjutan mulai dari pemerintahan terdekat yakni desa hingga kabupaten. Ada harapan dan keinginan bersama yang belum terealisasi dengan masyarakat agar Pemerintah Desa dan kabupaten melindungi dan membantu kemajuan Gapoktan ini. Kemajuan dan inovasi Gapoktan dapat ditunjang melalui regulasi yang kuat yakni Perdes ditingkat desa dan Perda ditingkat Kabupaten. Peningkatan kelembagaan dan pemberdayaan bagi potensi dan sumberdaya yang ada ini dapat ditempuh melalui proses Penyuluhan, Pelatihan, Pendampingan dan Kemitraan, dengan bantuan berbagai pihak baik pemerintah, perguruan tinggi dan pengusaha.

Penentuan Informan atau Sasaran Penelitian

Penelitian *Participatory Rural Appraisal* adalah menggunakan model metoda riset yang melibatkan masyarakat desa sendiri untuk mengidentifikasi dan mencari solusi serta menentukan kebutuhan yang harus diwujudkan masyarakat tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi pelaku atau peserta pemberdayaan berjumlah 15 – 20 orang setiap desa, yaitu

pemangku kepentingan lokal (*local stakeholder*) yaitu ketua RT, RW, kepala dusun, perangkat desa dan atau kepala desa, ketua koperasi, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku usaha (kelompok usaha), dan tokoh pemuda. Perinsipnya penentuan peserta didasarkan pada konsultasi dan dikoordinisasikan dengan kepala desa serta kepala dusun. Harapannya para peserta dari pemangku kepentingan lokal (*local stakeholder*) akan menjadi pionir (penggiat), motivator, dan inovator pemberdayaan bagi masyarakat lainnya yang merupakan penduduk setempat.

Teknik Pengumpulan Data Penyebaran Angket

Ada dua cara untuk penyebaran angket yaitu: Pertama; Penyebaran angket untuk mengidentifikasi motif, potensi, dan permasalahan serta jenis kebutuhan yang disebar ketika sebelum kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) dilaksanakan. Hal tersebut sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi pembahasan materi FGD dan masukan perencanaan program pemberdayaan masyarakat. Kedua; Penyebaran angket untuk kebutuhan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang disebarkan sesudah FGD dan atau sesudah pelatihan serta praktek pemberdayaan.

Wawancara

Wawancara dilakukan terbuka (*opened interview*) atau tidak terstruktur atau disebut juga wawancara mendalam yang memungkinkan pewawancara dan juga responden memperoleh keleluasaan. (Moss, 2005)

Selanjutnya wawancara semi terstruktur (Mikkelsen, 2011) yaitu terhadap informan kunci, kelompok-kelompok yang difokuskan baik yang homogen maupun campuran dan su-

dah dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan.

Teknik Observasi

Observasi atau pengamatan disebut juga observer partisipan (Kriyantono, 2009) yaitu orang luar yang netral (*outsider*) yang mempunyai kesempatan untuk bergabung dalam kelompok dan berpartisipasi dalam kegiatan dan pola hidup kelompok tersebut sambil melakukan pengamatan.

Denzin (Mulyana, 2006) menambahkan bahwa pengamatan berperan serta adalah strategi lapangan yang secara simultan memadukan analisis dokumen, wawancara dengan responden, dan informan, partisipasi, observasi langsung dan introspeksi.

Dokumentasi

Teknik Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk penelusuran dan memperoleh informasi serta data-data sebagai bukti atau fakta otentik. Baik yang melalui proses perekaman suara (audio), foto atau rekaman gambar (*audio visual*) atau dokumen data tertulis (*hardcopy atau softcopy*) bagi penelitian.

Teknik *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD sebagai teknik pengumpulan data untuk memahami sikap dan perilaku khalayak serta diskusi yang tidak terstruktur dengan topik yang dipersiapkan. Adapun yang perlu dipertimbangkan, yaitu : (1) Tidak ada jawaban yang benar atau salah setiap orang peserta FGD harus merasa bebas untuk menjawab sesuai dengan permasalahan diskusi. (2) segala interaksi dan perbincangan harus terekam dengan baik. (3) diskusi harus berjalan dengan suasana informal, sehingga peserta dapat memberikan komentar (antusias-aktif) sekalipun tidak ditanya

langsung sehingga terjadi tukar pendapat secara dinamis. (Kriyantono, 2009)

Bungin (2008) selanjutnya menjelaskan lagi pelaksanaan diskusi dalam FGD di pimpin oleh seorang pimpinan diskusi dan juga dibantu oleh notulen yang akan mencatat jalannya diskusi. Namun bisa saja pimpinan diskusi mencatat sendiri jalannya diskusi. Pada awal diskusi pimpinan diskusi mengarahkan fokus dan jalannya diskusi serata hal-hal yang akan dicapai pada akhir diskusi. Peserta benar-benar diharapkan dengan satu fokus persoalan yang sedang dihadapi dan dibahas bersama.

Sasaran diskusi dapat dirumuskan sendiri oleh pimpinan diskusi agar peserta melakukan diskusi secara terfokus. Bahan diskusi dicatat dalam transkrip yang lengkap, semua percakapan dicatat sebagaimana adanya, termasuk komentar peserta kepada peserta yang lain, dan kejadian-kejadian khusus saat diskusi. Transkrip FGD dibuat berdasarkan kronologi pembicara agar memudahkan analisis.

Teknik Analisis Data Penelitian

Uraian dan paparan di atas memberikan makna bahwa dengan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) sebagaimana menurut Syahyuti (2006) bahwa dalam validasi data ada triangulasi untuk menganalisis data, yaitu :

1. Dilakukan prinsip triangulasi yang digunakan baik pada metode, sumber maupun disiplin.
2. Mencari keragaman dan sekaligus perbedaan.
3. Investigasi secara langsung dari dan dengan masyarakat lokal.

Lebih lanjut penjelasan analisis triangulasi bahwa proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori. Analisis data

telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data juga merupakan proses penyusunan dan penyederhanaan data agar lebih mudah di baca dan diinterpretasikan.

Miles dan Huberman (2007) menjelaskan lebih lanjut dari ketiga komponen yaitu:

1. Reduksi data, yang merupakan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan dan klasifikasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, yang berlangsung secara terus-menerus selama penelitian.
2. Penyajian data adalah kumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, setelah data dikumpulkan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif mulai dari mencari, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang utuh, sehingga kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian, sebagai tinjauan ulang pada catatan lapangan, dan tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan "kesepakatan intersubjektif".

Ketiga hal utama tersebut sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun suatu analisis yang merupakan proses dan interaktif.

Begitupun proses analisis data FGD merupakan tahapan reduksi data dan pengumpulan. Seperti menurut Bungin (2008) analisis data FGD yaitu :

1. Melakukan koding terhadap sikap dan pendapat pertama yang memiliki kesamaan.
2. Menentukan kesamaan sikap dan pendapat berdasarkan konteks yang berbeda.
3. Menentukan persamaan istilah yang digunakan termasuk perbedaan pendapat terhadap istilah yang sama.
4. Melakukan klasifikasi dan katagorisasi terhadap sikap dan pendapat peserta.
5. Mencari hubungan diantara masing-masing katagori yang ada untuk membentuk bangunan hasil diskusi.
6. Teknik dalam pelaksanaan FGD dilakukan dengan cara berdialog atau wawancara mendalam dengan suasana keterbukaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Metode “PRA” tentang Jarak yang Dilematis

Berdasarkan Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) Tim Peneliti datang berkunjung ke tengah-tengah masyarakat untuk untuk bersama-sama membicarakan seluruh hal berkaitan dengan kesepakatan dalam rangka memberdayakan segala potensi masyarakat dalam membentuk skenario kekuatan ekonomi. Skenario kekuatan ekonomi ini dapat berupa kesepakatan untuk mendirikan BUMDes, atau sepakat untuk membentuk dan mendirikan Koperasi Unit Desa (KUD) atau mungkin ada bentuk pilihan lain yang tentu harus merupakan suatu kesepakatan masyarakat desa. Atau mungkin justru masyarakat lebih bersepakat untuk tidak perlu lagi mendirikan sebuah kekuatan ekonomi tertentu dan cukuplah menerima apa-apa yang sudah ada sebagai sebuah kekuatan asli. Mudah-mudahan hal ini malah sudah sesuai dengan potensi masyarakat desa yang ada dan solid.

Selama ini sudah lebih dari 10 tahun kondisi ekonomi masyarakat desa tetap kondusif dan bahkan mudah-mudahan ke depan semakin baik meski tidak ada sentuhan dari lembaga ekonomi yang lain. Berdasar kondisi terkini jumlah Gabungan Kelompok Tani dan kelompok tani ini dengan 1097 orang anggota dengan luas areal perkebunan sebesar 1030 ha.

Kondisi ini memberikan pemahaman kepada kami bahwa jarak antara desa dengan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat relatif dekat sehingga warga tidak terlalu menekankan pentingnya pembentukan suatu lembaga ekonomi. Kondisi sarana dan prasarana transportasi relatif lancar dan cukup mudah dijangkau. Justru yang sangat dibutuhkan adalah berbagai latihan pertanian dan pengadaan pupuk serta kalaupun memungkinkan adalah penyediaan modal.

Hasil Angket FGD Relatif Stabil

Berdasarkan dari hasil penyebaran angket penelitian baik sebelum dilaksanakan kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) maupun setelah kegiatan FGD dapat dijelaskan bahwa motivasi warga relatif tidak berubahwa berkaitan dengan pembentukan lembaga ekonomi. Jika pada waktu sebelum kegiatan FGD warga relatif belum bisa menyepakati mengenai pembentukan lembaga ekonomi seperti BUMDes bagi warga pedesaan, maka ketika setelah atau pada saat dilaksanakan kegiatan FGD ternyata kondisi tersebut tidak banyak berubah.

Memang ada terlihat potensi warga ke arah pembentukan lembaga ekonomi namun hal itu hanya berkaitan dengan pelatihan berbagai keterampilan yang terkait peningkatan pertanian. Bentuk lainnya adalah berhubungan dengan pengadaan pupuk

yang cukup sulit untuk memenuhi kebutuhan petani.

Permasalahan yang sering terjadi hanya dalam hal pemasaran produk. Kepemilikan kendaraan sebagai sarana angkutan yang tidak semua warga memilikinya sedikit menjadi kendala. Ada kecenderungan harga yang relatif berbeda, ada harga perseorangan, ada harga kelompok tani, ada harga GAPOKTAN dan bahkan ada harga tengkulak.

Harga tengkulak relatif tidak terlalu mengkhawatirkan. Di sinilah muncul sekelumit harapan apabila ada lembaga ekonomi masyarakat untuk dapat menyediakan kendaraan angkutan produk pertanian, namun ini juga bukanlah kebutuhan yang terlalu mendesak.

Seandainya benar-benar bisa diharapkan bahwa para petani, kelompok tani dan GAPOKTAN bisa bersatu padu dan bersepakat tanpa pengecualian untuk membentuk BUMDes dan melupakan segala yang pernah dibicarakan dan disepakati dulu, mungkin ada semacam harapan lain.

Hasil Wawancara idak Terlalu Mendesak Membentuk BUMDes

Wawancara yang dilakukan terbuka (*opened interview*) atau tidak terstruktur atau disebut juga wawancara mendalam yang memungkinkan pewawancara dan juga responden memperoleh keleluasaan menunjukkan bahwa usaha yang telah banyak dilakukan warga selama ini mulai menampakkan hasil.

Dengan jumlah GAPOKTAN sebanyak 6 buah dan Kelompok Tani sebanyak 43 kelompok tanik sangat memungkinkan bahwa banyak hal bisa dilakukan dan besar kemungkinan keberhasilan bisa diraih khususnya di bidang palawija dan termasuk sawah padi serta sayuran. Kondisi inilah yang

kemudian membuat para warga khususnya yang diwawancarai agak sulit mengambil sikap bahwa keberadaan lembaga ekonomi itu benar-benar dibutuhkan atau tidak.

Selanjutnya dengan wawancara semi terstruktur juga dilakukan pertanyaan yang sama namun dengan upaya yang lebih mendalam ternyata diperoleh hasil yang tdk terlalu berbeda. Dengan 13 informan yang diwawancarai dari 43 kelpok tani atau 1097 anggota yang memiliki luas areal lahan pertanian didapat data bahwa memang keberadaan lembaga ekonomi masyarakat tidak terlalu mendesak realisasinya. Apalagi jika hal ini mau diserahkan kepada elit warga desa tentu akan banyak membutuhkan berbagai persiapan.

“Masyarakat perdesaan di Kalimantan Barat masih asing Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Faisal Reza dari Pusat Penelitian Pembangunan Desa (Puslitbangdes) UNTAN mengatakan pemerintah perlu lebih mengencarkan pembentukkan BUMDes kepada masyarakat. Sejauh ini dilihat dari relasi Kelembagaan BUMDes sendiri masih banyak masyarakat yang tidak memahami tentang keberadaan BUMDes/” ujarnya kemarin (Pontianak Post 3 November 2017).

Pernyataan pakar pedesaan dari Untan ini memberikan deskripsi kepada kita bahwa upaya pemerintah dalam melakukan sosialisasi BUMDes ini masih sangat perlu ditingkatkan dan terus didorong sampai masyarakat merasakan benar manfaatnya. isi lain dapat dikatakan bahwa masyarakat masih jauh sekali dalam memiliki kepaahaman tentang BUMDes dan manfaatnya bagi warga pedesaan.

Hasil Observasi Meminta Pemerintah Mendorong Sosialisasi

Observasi atau pengamatan disebut juga observer partisipan (Kriyantono, 2009 : 109) yaitu orang luar yang netral (*outsider*) yang mempunyai kesempatan untuk bergabung dalam kelompok dan berpartisipasi dalam kegiatan dan pola hidup kelompok tersebut sambil melakukan pengamatan. Dari observer partisipan ini diperoleh informasi bahwa memang dipandang perlu sekali mendorong pihak pemerintah untuk terus melakukan program sosialisasi BUMDes ini kepada masyarakat desa. Hal senada dengan pendapat Hotler Panjaitan bahwa pemerintah mendorong masyarakat desa untuk terus menggalakkan dan mendorong terbentuknya BUMDes karena pada tahun 2018 terdapat tujuh desa yang mendapat pilot proyek dalam pembentukan BUMDes di Kabupaten Sintang. (HU. Pontianak Post 27 Oktober 2017).

Denzin (Mulyana, 2006 : 163) menambahkan bahwa pengamatan berperan-serta adalah strategi lapangan yang dapat mendorong secara simultan untuk memadukan analisis dokumen, wawancara dengan responden, dan informan, partisipasi, observasi langsung dan introspeksi dalam mewujudkan keberadaan lembaga ekonomi masyarakat desa ini. Berdasarkan pendapat ini dapat disim-

pulkan bahwa upaya yang terus-menerus dalam mendorong iklim pembentukan BUMDes ini sangat perlu di-realisasikan.

Pembentukan BUMDes sudah semakin urgen dan mendesak. Manfaatnya tentu akan sangat dibutuhkan warga desa diberbagai daerah atau wilayah. Meski khususnya di Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya hal ini belum terlalu mendesak dibutuhkan, namun di desa lain dengan kondisi yang berbeda tentu berbeda pula kebutuhannya. Apalagi dengan kondisi kebijakan pemerintah pusat yang menggelirkan sejumlah dana dari pusat ke desa tentu akan menjadi semakin penting dan diperlukan keseriusan dalam banyak hal agar efektif dan efisien.

Berdasarkan data yang tertera sebagaimana terlampir dalam Lampiran Tabel 1, dapat dijelaskan bahwa:

1. Ada GAPOKTAN yang berjumlah 6 buah;
2. Ada Kelompok Tani yang berjumlah 43 kelompok
3. Jumlah petani di Desa Sungai Kakap yang berjumlah 1097 orang
4. Luas lahan pertanian aktif 1030 ha
5. Beberapa foto kondisi lapangan dapat kami tampilkan sebagai berikut:

Tabel 1: Rekapitulasi Gabungan Kelompok Tani Dan Kelompok Tani Desa Sungai Kakap

No	Gapoktan / Poktan	Alamat Sekretariat	Tahun	Total	Komoditas Unggulan + Padi Sayuran	Luas (Ha)	Nama Pengurus		
			Berdiri	Anggota			Ketua	Sekretaris	Bendahara
I	MERAK MANDIRI		2007	293		233	H. Matteh	Mirwar Samsudin	Usman S. Hamid Mang
	1 Merpati Tani		2008	28		20	Fandi	Samsudin HK	
	2 Mahmud Karva Mandiri		2006	25		25	Mochtar MS	Pawani	Yani
	3		2006	38		25	Mirwar M Umar	Syif Nuraini	Dahlia
	4 Nirwana Insu Bahagia		2006	25		25	Ahmad H Kadir	Usman	Zainudin
	5		2006	26			M. Tahir Ali	Junaidi Samsudin HK	Abdilah Rabuan
	6 Sri Rejeki		2006	25		25	Effendi Ahmad Musa		Usman
	7 Tanggulang		2006	25		25	Usman Sidig M Yusuf	Umar Tugu	Ependi K
	8 Merak		2006	31		20		Sahrani	Hairan
	9 Sepakat Sumba Abadi		2009	35		22	T	Andi Kurniawan	Samsudin B
	10		2009	35		27	Jamaludin		

II	MUKTI		2008	251	Padi + Sayuran	231	Rudi Hartono	Supaiman	Supardi
	1	Barito	2011	22		26	Suranto	Sugeng Rahayu	Suryono
	2	Ingin Berkarya	2010	22		22	Rudi Hartono	Risman	Sudaryono
	3	Juwita	1989	20		20	Sumarno	Bejo Armanto	Sarwadi
	4	Mamiri	2011	25		20	Sulaiman	Supardi	Anwar
	5	Garuda jaya	2011	25		25	Sariefudin	M. Kacang	
	6	Ingin Maju	2011	36		25	Supaiman	Hadi Suwarno	Ranto
	7	Lestari	2011	25		25	M. Said	Agus Siswanto	M. Nur
	8	Tani Baru	2010	27		25	Segerno	Juliono	Suparsono
	9	Mitra Usaha		25		21	Pauzan Adam	Marjani	M. Nor Bacong
	10	Harapan Bahagia		24		22	Fauzi Bujang	Pelleng Maulana	A. Rasib

III	SOLO BERSATU	Prt Solo		139	Padi + Sayuran	143	Badrun Solihin	Sugeng Rahayu	Kusdi
	1	Prasojo	2010	18		18	Suwaji	Rahmat	Julianto
	2	Tani Makmur	2010	25		25	Sugino	Suhardi	Dulwahid
	3	Subur Indah I	1993	23		25	Sukanto	Sugeng	Iskandar
	4	Subur Indah II	2010	25		25	Kusdi	Rohim	Darmuji
	5	Tunas Muda 1	2011	23		25	Badrun Solihin	Parimin	Suroso
	6	Tunas Muda 2	2011	25		25	Darmaji	Budi	Sarifudin

IV	MADIUN BERSATU	Prt Keladi		150	Padi + Sayuran	150.5	Jainuri	Suwaji	Karno
	1	Karya Bersama	2009	23		21	Subandi	Kasianto	Jenal
	2	Usaha Bersama	2009	21		18.5	Sumarni	Warni	Suharto
	3	Sido Harjo	2009	25		31	Sumani	Karno	Amir
	4	Sido Dadi	2009	29		26	Ab. Mutohib	Muslim	Suroso
	5	Sinar Maju I	2009	25		29	Jumiran	Budiono	Heri Mulyanto
	6	Sinar Maju II	2009	27		25	Satimin	Sagimin	M. Zul

V	RIMONG MAS	Prt Keladi		145	Padi + Sayuran	148.5	Madrin	Syarif	Salman
	1	Maju Terus	2011	22		20	Sumanto	Paino	Tugino
	2	Pemula	2011	25		25	Salman	Misno	Hadiman
	3	Cahaya Tani	1980	24		22.5	Madrin	Ngadar	Ngatijan
	4	Harapan Bahagia	1990	27		29	Syarif	Juwedi	Satino
	5	Maju Terus I	2011	24		25	Sukiman	Asrofi	Heru
	6	Cahaya Tani I	1993	23		27	Turiman	Sangudi	Supardi

VI	SOLO BERSERI	Prt Solo		119	Padi + Sayuran	124	Purwadi	Sajiman	Tukinen
	1	Barito	2011	23		25	Sajiman	Parino	Poniman
	2	Sinta Nur	2009	25		25	Slamet Riyadi	Eko Sucipto	Asit
	3	Tani Solo	2009	25		24	Bejo	Yono	Juwandi
	4	Sido Mulyo	2009	21		25	Toibun	Amat	Karbulan
	5	Maju Bersama	2011	25		25	Sugiyanto	Saripudin	Sumarto
Jumlah				1,097		1,030			

Hasil Studi Dokumentasi yang Menggembirakan

Teknik Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk penelusuran dan memperoleh informasi serta data-data

sebagai bukti atau fakta otentik. Baik yang melalui proses perekaman suara (audio), foto atau rekaman Data selengkapnya dapat dilihat sebagaimana terlampir.



Gambar 1: Saat turun lapangan jumpa dengan Kepala Desa



Gambar 2: Saat wawancara dengan wakil Kelompok Tani



Gambar 3: Saat kegiatan FGD



Gambar 4: Kondisi lahan pertanian

Hasil “FGD” Meminta Diklat dan Pengadaan Pupuk

FGD dilakukan sebagai upaya untuk memahami sikap dan perilaku khlayak serta diskusi yang tidak terstruktur dengan topik yang dipersiapkan. Adapun yang didapat dari kegiatan FGD ini, yaitu :

1. Begitu seru dan intensnya kegiatan FGD ini dan sangat sulit untuk menetapkan dan mengambil sebelah mana yang dominan karena kekuatan idealisme yang relatif berimbang. Akan tetapi sebenarnya bukanlah sebelah mana saja yang dominan, karena kondisi saat ini memang pendapat yang manapun yang mau dibenarkan. Sesungguhnya pembentukan lembaga ekonomi desa tidaklah terlalu mendesak kecuali pelatihan atau diklat dan pengadaan dan supply pupuk untuk meningkatkan produktifitas pertanian.
2. Ditambahkan lagi bahwa pembentukan BUMDes tersebut juga masih harus dikaji dan ditinjau secara mendalam karena bukankah dengan membentuk Koperasi Unit Desa (KUD) inipun tidak kalah penting dan manfaatnya bagi warga desa.

Hal ini senada dengan ungkapan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kalimantan Barat mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi Koperasi, ini berkaitan dengan tempat pelaksanaannya masih di tingkat desa . “Jika di tingkat desa maka idealnya koperasi. Badan Hukumnya Koperasi sehingga didukung oleh seluruh masyarakat di tingkat desa. Keuntungan dibagikan ke masyarakat di desa. Itu essensi dari koperasi.” Demikian dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kalbar Bapak Marsianus SY di Pontianak. (HU Pontianak Post 4 September 2017).

3. Kondisi dinamis dalam FGD ini (Kriyantono, 2009 : 116-117) memunculkan sedikit informasi yang cukup tidak disangka-sangka bahwa mendirikan BUMDes ternyata hanya memberikan kontribusi kepada sedikit orang sedangkan jika mendirikan koperasi maka seluruh warga desa akan lebih banyak yang bisa menikmati hasilnya.

Tetapi keadaan ini tidak seperti yang terlintas dalam pikiran para pengamat, Hal ini lebih dikare-

nakan adanya ide dan gagasan dari para kelompok tertentu yang lebih mengemukakan unsur pribadi.

Diskusi

Kondisi dimana letak daerah Kabupaten Kubu Raya yang memang hanya dipisahkan oleh saluran parit dengan Ibu Kota Provinsi atau Ibu Kota Pontianak menjadikan permasalahan penelitian ini serba tanggung dan relatif. Lembaga ekonomi seperti BUMDes sangat mungkin memang dibutuhkan, namun jaraknya dengan ibu kota yang tidak jauh membuat kondisi ini hampir belum terlalu diperlukan. Jika ada kebutuhan yang tidak ada di desa, maka hanya dalam waktu sebentar saja warga bisa mencarinya ke arah kota saja.

Kemudian dengan jumlah petani sebanyak 1097 orang dan dengan jumlah kelompok tani sebanyak 43 kelompok serta Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) ada 6 buah hal relatif sudah cukup memenuhi berbagai kebutuhan khususnya di bidang pertanian. Kalaupun nantinya didirikan juga BUMDes akan menjadi sangat sulit perkembangannya dan pengelolannya.

Meski dengan jumlah penduduk 11479 orang berdasarkan data BPS Kalbar dalam angka pada tahun 2014, dan dengan jumlah KK 2575 hal ini tidak terlalu merepotkan. Di Desa Sungai Kakap ini terdapat 1097 orang petani. Ini berarti hampir separuhnya dari jumlah KK yang ada.

Luas lahan di desa ini yang berjumlah 2862 Ha sebagian besarnya yaitu berjumlah 1030 Ha sudah menjadi lahan aktif yang digarap warga desa.

Simpulan, Implikasi dan Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sesungguhnya pembentukan lembaga ekonomi desa tidaklah terlalu mendesak kecuali pelatihan atau diklat dan pengadaan dan supply pupuk untuk meningkatkan produktifitas pertanian.
2. Jika di tingkat desa maka idealnya koperasi. Badan Hukumnya Koperasi didukung oleh seluruh masyarakat di tingkat desa. Keuntungan dibagikan ke masyarakat di desa. Itu esensi dari koperasi.
3. Mendirikan BUMDes ternyata hanya memberikan kontribusi kepada sedikit orang sedangkan jika mendirikan koperasi maka seluruh warga desa akan lebih banyak yang bisa menikmati hasilnya.

Adapun beberapa implikasi yang dapat dikemukakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendirian atau pembentukan BUMDes sangat memungkinkan, namun kaji terlebih dahulu kesiapan kondisi sosial, ekonomi dan politisnya untuk kebaikan desa.
2. Utamakanlah kesepakatan yang ideal dalam menyepakati segala termasuk pendirian BUMDes agar terhindar dari berbagai hal yang merugikan banyak pihak.

Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Masih dibutuhkan banyak waktu untuk melengkapinya. Sebaiknya yang tepat kapan diperlukan waktunya untuk mendirikan BUMDes bagi warga desa, Bagaimana sebaiknya dengan jika mendirikan koperasi. Mungkin akan banyak dibutuhkan lembaga atau sarana dan prasarana lain untuk lebih menyempurnakan kondisi di tengah masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

Permendagri Nomor 39 tahun 2010
tentang Badan Usaha Milik Desa

Pratikno, 2007, "Sub-Saharan Africa:
From Crisis to Sustainable
Growth.

Rangkuti, Adil Parlaungan, 2011, *Ko-
munikasi Pembangunan dan Me-*

kanisasi Pertanian. IPB Press.
Bogor.

Rohimah, AfifaturL, 2014, *Memper-
kuat Basis Ekonomi Desa
melalui Pemberdayaan Kelom-
pok Dimasyarakat*, Jakarta.

Syahyuti : *Metode Participatory Rural
Appraisal(PRA)*, Jakaera, 2006